

Intimidasi Penulis

(Kasus penulis di detik.com mendapat intimidasi)

Highlight/Analisis	Respon/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Seorang ASN yang menerbitkan artikel tentang jenderal di jabatan sipil di detikcom mendapat kekerasan fisik dari orang tak dikenal. Serangan teror itu dialami penulis setelah artikel tersebut tayang di rubrik kolom pada Kamis, 22 Mei 2025. AJI Indonesia: ini merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara dalam peristiwa itu. Kasus ini menekankan perlunya komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi. Langkah-langkah konkret dan sistematis harus diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. 	<p>Perlindungan hukum bagi penulis dan jurnalis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan intimidasi dengan serius dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada penulis dan jurnalis yang menghadapi ancaman. <p>Audit dan evaluasi prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu langkah evaluatif dalam menempatkan militer di jabatan sipil dengan tujuan menjawab substansi kritik dalam opini penulis. Hasil evaluasi diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sipil atas militer.

Ancaman PKH Massal Sektor Perhotelan

(Kasus Ancaman PKH Massal sektor Perhotelan di Jakarta)

Highlight/Analisis	Respon/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Sejumlah 70 persen pelaku perhotelan di Jakarta mengaku akan memangkas karyawan. 	<p>Pelonggaran Kebijakan Efisiensi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> Okupansi tertinggi perhotelan diperoleh dari kegiatan pemerintah, maka kebijakan

<ul style="list-style-type: none"> • Survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) April 2025: Mayoritas pelaku usaha memprediksi akan mengurangi tenaga kerja antara 10 persen hingga 30 persen. • Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, yang mana segmen pasar pemerintahan selama ini menjadi penyumbang utama okupansi. 	<p>efisiensi terkait penggunaan hotel pemerintah dapat dikaji lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ini untuk mempertimbangkan ancaman PHK Massal. • Pertimbangan kelonggaran efisiensi pemerintah ini tetap mempertahankan mutu dan kualitas kegiatan, serta menitikberatkan pada transparansi. <p>Pemberian Insentif atau Bantuan Finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan ini dapat dilakukan dengan model keringanan beban pajak untuk meminimalisir ancaman PHK di tengah krisis ekonomi. <p>Menyiapkan Pelatihan atau Skema Pendampingan Bagi Korban PHK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan/upgrade skill perlu dilakukan untuk mengantisipasi PHK massal, dapat berupa pelatihan bisnis usaha atau keterampilan yang lain.
---	---

Eksplorasi Terhadap Anak

(Kasus Pengemis Badut Membawa Anak di Jakarta Timur yang ditertibkan)

Highlight/Analisis	Respon/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melalui Suku Dinas Sosial (Sudinsos) mengaku telah berulang kali menertibkan pengemis perempuan yang mengenakan kostum badut dan 	<p>Melakukan Penertiban dan Razia Terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah melalui Suku Dinas Sosial dan Satpol PP perlu lebih sering untuk melakukan penertiban, hal ini

<p>membawa anak di sekitar Stasiun Klender Baru, Jakarta Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plt Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Rizqon Hermawan menjelaskan, penertiban dilakukan usai pihaknya sering menerima laporan soal keberadaan pengemis berkostum badut tersebut dari sosial media maupun aplikasi JAKI (Jakarta Kini). 	<p>menindaklanjuti kondisi masalah sosial serupa yang berulang agar tidak terkesan abai terhadap kondisi yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban sosial secara berkala dan berulang akan membentuk keteraturan sosial. <p>Penerapan Regulasi secara tegas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat menerapkan regulasi UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara tegas untuk melindungi anak dari eksploitasi. <p>Rehabilitasi dan Pelatihan Keterampilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinsos dan aparat terkait dapat melakukan fungsi rehabilitasi, baik bagi anak korban eksploitasi atau para pelaku. • Bagi para pelaku, pemerintah dapat melaksanakan pelatihan keterampilan kerja.
--	---

Penggunaan Lahan Negara Secara Tidak Sah

(Kasus Pendudukan Lahan BMKG oleh Ormas Grib di Tangerang Selatan)

Highlight/Analisis	Respon/Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Proyek pembangunan Gedung Arsip milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, menjadi terhambat sejak dimulai November 2023. 	<p>Penegakan Hukum Secara Tegas dan Konsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Satpol PP, dan Kejaksaan, harus menindaklanjuti setiap pelanggaran penggunaan lahan negara. Tidak boleh ada pembiaran terhadap

<ul style="list-style-type: none">• Penyebabnya, karena lahan seluas 127.780 meter persegi atau sekira 12 hektar yang akan dibangun Gedung Arsip BMKG tersebut diduduki oleh organisasi masyarakat (ormas) secara ilegal selama hampir dua tahun.• Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota GRIB Jaya yang telah menguasai lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selama bertahun-tahun pada Sabtu (24/5/2025).• Mereka ditangkap di lokasi yang sebelumnya diklaim sebagai milik ahli waris yang dibela oleh GRIB Jaya, yakni di Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).• Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap penggunaan lahan negara yang tidak sah, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ormas yang dapat mengganggu kepentingan publik dan proyek strategis nasional.	<p>pendudukan liar, pembangunan tanpa izin dan juga tindakan menghalangi proyek strategis nasional.</p> <p>Perlindungan Aset Negara</p> <ul style="list-style-type: none">• Instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan (untuk aset negara), dan lembaga pemilik lahan (seperti BMKG), perlu bekerja sama memastikan status hukum lahan jelas, tercatat, dan terlindungi dari penyalahgunaan.• Langkah-langkah penting termasuk:<ul style="list-style-type: none">○ Sertifikasi lahan negara,○ Pemagaran fisik atau tanda kepemilikan resmi,○ Pengawasan berkala terhadap lahan kosong atau belum dibangun. <p>Pencegahan Melalui Pengawasan dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mencegah pendudukan liar, terutama dengan:<ul style="list-style-type: none">○ Memantau aktivitas ormas atau kelompok masyarakat,○ Mengontrol penggunaan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
--	---